BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERBUP NO. 46, BD 2017/NO.46, 22 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab Mimika No. 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitas organisasi politik dan kemasyarakatan; b. Melaksanakan kegiatan di bidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan; c. Monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pemantuan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, sesuai standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku politik. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Program. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan Program meliputi penyusunan program dan anggaran, b. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat, c. Penyelenggara Urusan Keuangan dan Perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LPH dan perlengkapan. Bidang Bina Ideologi, Wawasan dan Karakter Bangsa meliputi Pengumpulan bahan keterangan dan informasi, pemetaan kondisi, pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan, pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air, pembentukan dan pengembangan karakter Bangsa, pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi da perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional, penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan, penanaman kecintaan terhadap bendera, Bahasa, lembaga negara dan lagu kebangsaan Indonesia, pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan, Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pengumpulan bahan keterangan dan informasi, pemetaan situasi kondisi, peningkatan pemahaman mengenai demokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, fasilitas peningkatan partisipasi perempuan, pelaksana dan fasilitas pendidik politik, fasilitas peningkatan pemahaman mengenai etika, penyusunan data dan informasi partai politik, fasilitas peningkatan

kapasitas kelembagaan partai politik, pemantauan perkembangan politik dalam negeri. Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi: pengumpulan bahan keterangan dan informasi, pemetaan ketahanan lingkungan hidup sumber daya alam, pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup, fasilitas dan koordinasi penanganan masalah lingkungan, ketahanan ekonomi makro dan mikro. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi: Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional, pemetaan kondisi stabilitas keamanan negeri, pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan SDM, pelaksanaan deteksi dini, pengelolaan data dan informasi, penyelesaian dan pengintegrasian informasi, penyusunan hasil analisis dan evaluasi, pelaksanaan forum kewaspadaan dini, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Dinas serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya, selain itu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan / atau sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala diangkat diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2017 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.